

EVALUASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI DESA DI DESA SUNGAI SIRIH KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ANGGI KHAIRANI SIREGAR

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Jake, Teluk Kuantan, RIAU.

Email: anggikhairani@gmail.com

ABSTRACT

This research was carried out in the village in Sungai Sirih Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to find out how the administration of the village of Sungai Sirih Didesa, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the study was how the implementation of village administration in the Sungai Sirih Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique uses purposive sampling. Purposive Sampling is a technique of determining samples with certain considerations. The results of the research on the Administration of the Village of the Sirih River Village in Singingi Subdistrict, Kuantan Singingi Regency, have not been fully good. This can be seen from the results of field studies showing that Sungai Sirih Village, Singingi Subdistrict, Kuantan Singingi Regency lacks human resources who really understand the administration of this village and resources that understand IT, as well as facility limitations because currently the village office still uses the former kindergarten building which made the implementation of the village administration not optimal, including the implementation of the administration of this village.

Keywords: Evaluation, implementation of village administration

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Administrasi pemerintah memegang peranan yang penting karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai.

Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang ditetapkan pemerintah, dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan.

Peningkatan dan pengembangan administrasi pemerintahan desa diharapkan dapat berperan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi yang di bebaskan kepada pemerintahan desa. Dalam struktur pemerintahan desa terdapat seperangkat aparat yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi sebagai komponen penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa. Untuk dapat memberikan hasil yang optimal di dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa maka diperlukan adanya kemampuan yang memadai baik dari segi kemampuan aparat pelaksana itu sendiri maupun dari segi ketersediaan fasilitas pendukung, termasuk kondisi pekerjaan yang dilaksanakan sehingga akan dapat diarahkan kepada adanya kesatuan tindakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Pengaturan tentang administrasi desa bertujuan untuk menjadikan desa lebih mandiri, tanpa harus selalu bergantung pada pemerintahan di atasnya. Selain itu tujuan dari administrasi desa ialah untuk menjadi landasan dasar dalam setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah terkait pembangunan nasional.

Namun, masih adanya permasalahan terkait pelaksanaan tertib administrasi desa dalam hal pelaksanaan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan administrasi desa karena keterbatasan sumber daya pemerintahan desa. Maksudnya aparatur pemerintahan desa dihadapkan pada keterbatasan kapasitas dalam menyusun tertib administrasi desa secara baik dan benar. Hal ini menuntut adanya kapasitas yang mumpuni dari aparatur desa dalam pengelolaan potensi desa dan melaksanakan tertib administrasi desa, karena dengan kapasitas aparatur yang baik maka penyelenggaraan pemerintahan desa akan berjalan dengan baik juga.

Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas di bidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Aparatur pemerintah desa merupakan alat pemerintah sebagai pelaksana pemerintah terendah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menunjukkan kapasitas yang optimal sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

Oleh karena itu, agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kapasitas yang memadai atau optimal. Kualitas tersebut selain dilandasi kapasitas dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan ,tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang ditetapkan pemerintah, dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan.

Berdasarkan prariset yang telah dilakukan di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, masih terlihatnya Fenomena ataupun gejala diantaranya :

1. Pemerintah Desa Sungai Sirih belum menyelesaikan tugasnya dalam melaksanakan administrasi desa dengan baik Hal ini dapat dilihat dari kurang updatenya buku-buku administrasi desa, seperti pada :
 - a. Administrasi Umum pada bagian inventaris desa, belum ada tertera jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan baik dan dalam keadaan rusak, dan terdapat jumlah barang/bangunan yang rusak atau sudah tidak ada namun masih tetap tertera dibuku inventaris atau tidak dituliskan pada barang/bangunan yang dihapus karena rusak.
 - b. Administrasi penduduk itu pada buku mutasi desa tidak ada tertera informasi siapa yang pindah, dan siapa yang datang sebagai penduduk sementara.
 - c. Administrasi pembangunan, itu pada buku rencana pembangunan tidak di cantumkan apa-apa yang akan dibangun, sehingga masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah tidak dapat mengetahui apa-apa saja yang akan dibangun
2. Kurang mempunyainya kapasitas aparatur Desa Sungai Sirih dalam penyelenggaraan pemerintahan, ini menyebabkan kurang updatenya administrasi pemerintahan desa ini. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusianya yang kurang menguasai IT, kurangnya pendidikan dan pelatihan aparat desa mengenai administrasi pemerintahan desa.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas aparat dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya ialah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang masih rendah akan mempengaruhi kapasitas dari aparat desa dalam melaksanakan tugas nya terutama dibidang administrasi. Berikut ini merupakan daftar tingkat pendidikan aparatur Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel 1: Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Suminto	Kepala Desa	SMA
2	Endar Moyo	Sekretaris	SMA
3	Baharudin Saleh	Kepala Urusan Umum	SMK
4	Anang Hermawan	Kepala Urusan Kesejahteraan & Pelayanan	SMA
5	Supardjo	Kepala Urusan Pemerintahan	S1
6	Rizki Wulandari	Kepala Urusan Keuangan	S1
7	Suwoto	Kadus Rawasari	SMA
8	Nurmansyah	Kadus Margodadi	SMA
9	Sitas Riyanto	Kadus Sidomulyo	S1
10	A. Damiri	Ketua BPD	SMA

11	Sholikun	Wakil Ketua BPD	SMA
12	Bambang Supriyadi	Sekretaris BPD	S1
13	Sujiono	Anggota BPD	SMP

Sumber : Kantor Desa Sungai Sirih 2019

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat tingkat pendidikan desa sungai sirih masih rendah yang rata-rata hanya sekolah menengah atas, bahkan ada yang masih sekolah menengah pertama. Kepala desa selaku pemimpin desa dan sekretaris desa selaku aparat yang menangani bidang administrasi hanya berpendidikan SMA, namun aparatur desa harus memiliki kualitas pendidikan yang memadai dan juga harus disertai kedisiplinan yang tinggi sehingga dapat merealisasikan tertib administrasi desa dengan baik.

Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa Selain kapasitas aparatur desa, masalah lain yang ada didesa sungai sirih adalah segi ketersediaan fasilitas pendukung. Desa sungai sirih ini belum memiliki kantor yang memadai, sebab kantor desa sungai sirih saat ini memakai gedung bekas taman kanak-kanak (TK), menurut wawancara lepas dengan kepala urusan keuangan, keterbatasan fasilitas, karan desa sungai sirih ini belum memiliki kantor, hal ini menyebabkan kendala dalam administrasi pembukuan disungai sirih ini, sebab file-file masih numpuk dan tidak tertata yang apabila sewaktu-waktu diperlukan harus bongkar-bongkar dulu untuk mendapat apa yang dicari, yang tentunya akan memakan waktu.

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana Pelaksanaan Administrasi Desa di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?” yang bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Administrasi Desa Di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

3. TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Teori /Konsep Ilmu Administrasi Negara

Istilah Administrasi Negara dapat di bagi ke dalam dua bentuk yakni Administrasi dan Negara. Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *administrare* yang berarti melayani, membantu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, menggunakan istilah *administration* yang sebenarnya dari kata *Ad (intensif)* dan *ministrare (to serve)* yang berarti melayani. Sedangkan Negara secara etimologis berasal bahasa Inggris *State* yang artinya dalam bahasa latin yaitu *status* yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap atau lebih sering disebut *station* yang berarti kedudukan.

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus , mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan *pe* dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan palagi pengaturan dalah terciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administarasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015 : 23).

Menurut Sondang P Siagian (dalam syafii, 2016 : 5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Nawawi (dalam syafii, 2016 : 5) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Max Weber (dalam Kumortono,

2005 : 82) Administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui Negara.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafiie, 2016 : 4) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam kegiatannya Henry Fayol (dalam Anggara, 2012 : 144) memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu :

1. Merencanakan
2. Mengorganisasikan
3. Memimpin
4. Melaksanakan pengorganisasian
5. Melaksanakan pengawasan

Unsur administrasi adalah bagian-bagian penting dalam administrasi yang menjadikan administrasi itu utuh dan sempurna sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Ahli administrasi sepakat bahwa terdapat delapan unsur administrasi.

3.2. Teori Kebijakan

Secara epistemologi istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris "*policy*". Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan diartikan sama dengan keputusan. Padahal sebenarnya istilah kebijakan dengan keputusan merupakan kedua istilah yang jauh berbeda. Letak perbedaan yang dapat kita lihat dari kedua istilah tersebut terletak pada luas cakupan dan arti pentingnya.

Menurut Dunn (dalam Pasolong, 2007:39) kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut tugas pemerintah. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan juga sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah dan kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. (Agustino, 2008 : 7)

Eyestone (dalam Winarno, 2012 : 20) mengartikan kebijakan publik secara luas sebagai hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya. Pendapat yang diutarakan oleh Eyestone tentang kebijakan publik sangat luas dan mencakup banyak hal sehingga terlihat tidak ada batasan dalam definisi Robert tentang kebijakan public.

3.3. Teori Evaluasi

Menurut Suchman yang evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Stutflebeam (dalam Arikunto,dkk 2010 : 56) menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. (Arifin, 2010 : 45). Tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah (Crawford, 2000 : 30) :

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang.

Evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Berikut penjelasan salah satu tahapan evaluasi yang umumnya digunakan. (Umar, 2005 : 78):

Menurut Dunn (dalam Mulyadi, 2015: 124) enam kriteria yang dapat digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil, yaitu :

1. *Effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. *Efficiency* atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. *Adequacy* atau kecukupan, yaitu berkenaan dengan kecukupan sumber daya dengan jumlah pengguna jasa.
4. *Equity* atau kesamaan, yaitu erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat.
6. *Appropriateness* atau ketepatangunaan, yaitu yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Dunn (dalam Nugroho, 2017 : 289 – 290) mengembangkan tiga pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi keputusan teoritis.

1. Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kebijakan tanpa berusaha menayakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut pada target kebijakan.
2. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil kebijakan.
3. Evaluasi keputusan teoritis (*Decision Theoretic Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit.

3.4. Teori Desentralisasi Administrasi

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka munculkan otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. (Syamsuddin, 2007 : 52)

Desentralisasi terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan utama yaitu desentralisasi politik (devolusi) dan desentralisasi administrasi (dekonsentrasi). Devolusi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada sub nasional dari pemerintah yang mempunyai tingkat otonomi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut. Konsekuensi dari devolusi adalah pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintah di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi tertentu kepada unit-unit untuk dilaksanakan secara mandiri. Sedangkan dekonsentrasi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam administrasi pemerintah pusat kepada unit-unit di daerah. (Syamsuddin, 2007 : 4).

Desentralisasi juga diartikan sebagai suatu sistem dalam bidang pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam system sentralisasi, kewenangan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan disebut desentralisasi. (Sarundajang, 2002 : 66).

Beberapa alasan mengapa Indonesia harus menganut desentralisasi adalah adanya landasan konstitusional yang kuat dalam Pasal 18 UUD 1945 untuk melaksanakan desentralisasi. Landasan konstitusional ini juga menjadi suatu momentum dalam penguatan demokrasi ditingkat lokal dengan anggapan bahwa desentralisasi berkaitan erat dengan demokratisasi. Sesuai dengan dinamika pemerintahan daerah, maka sistem desentralisasi dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan untuk lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Alasan diadukannya desentralisasi adalah sebagai berikut (Rudy, 2012 : 16):

1. Dilihat dari sudut politik sebagai pendelegasian kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja.
2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Upaya yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat di tangan pusat tetap diurus oleh Pemerintah Pusat.
4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan pada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya.
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena Pemerintah Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

3.5. Teori Pemerintahan Desa

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Awang (2010) “pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.

Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Ruang lingkup Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari : (permendagri no 47 tahun 2016)

1. Administrasi Umum
2. Administrasi Penduduk
3. Administrasi keuangan.
4. Administrasi pembangunan

4. METODE PENELITIAN

Yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kualitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada saat variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti anpa menggunakan data kuantitatif, tapi lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dan menjawab permasalahan yang dihadapi.

Teknik penentuan sampling yang peneliti gunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017 : 96). Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah aparat desa sungai sirih, karena informan yang dipilih dianggap lebih memahami mengenai Pelaksanaan Adminstrasi Desa di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian pada Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama Responden	Jumlah		Persentase
		<i>Informan</i>	<i>Key Informan</i>	
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris	1	1	100%
3	Kepala Urusan	4	4	100%
Jumlah		6	6	100%

Sumber : Kantor Desa Sungai Sirih Tahun 2018

Fokus penelitian terhadap Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Desa dilaksanakan Di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan formal.

2. Observasi

Merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. (Gunawan, 2015: 143)

3. Dokumentasi

adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Triangulasi

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data untuk memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber.

Analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Hubberman, aktivitas dalam analisis data, yaitu *Data Reduction, Data Display, Conclusion Drawing/Verification*.

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Desa di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dengan indikator :

- a. *Effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
- b. *Efficiency* atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
- c. *Adequacy* atau kecukupan, yaitu berkenaan dengan Kecukupan sumber daya dengan jumlah pengguna jasa.
- d. *Equity* atau kesamaan, yaitu erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- e. *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat.
- f. *Appropriateness* atau ketepatangunaan, yaitu yang berhubungan dengan hasil, apakah hasil yang diinginkan benar tercapai.

Tabel 3 : Konsep Variabel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Desa di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Item	Ukuran
Teori evaluasi menurut Dunn	Evaluasi pelaksanaan administrasi	1. Efektifitas	a. Pelaksanaan penyelenggaraan b. Pencapaian tujuan c. kendala dalam Pelaksanaan	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		2. Efisiensi	a. Usaha oleh pihak pelaksana b. Tingkat efisiensi c. Hasil penyelenggaraan administrasi	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

		3. Kecukupan	a. Sumber daya manusia b. Sumber daya anggaran c. Kecukupan peralatan	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		4. Kesamaan	a. Kesamaan pemberlakuan administrasi pemerintahan desa. b. Kesamaan proses dalam administrasi c. kewenangan administrasi desa	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		5. Ketanggapan	a. Pelayanan yang diberikan . b. Kendala	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		6. Ketepatan	a. Ketepatan mengenai pelaksanaan administrasi pemerintahan desa b. Hasil dari pelaksanaan administrasi c. Hasil dari pelaksanaan administrasi	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2019

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kuantan Singingi mengenai indikator Efektifitas. Efektifitas ialah berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

Berikut Kutipan Wawancara Dengan Rizki Wulandari selaku Kepala Urusan Keuangan yang sependapat dengan Baharudin Saleh selaku Kepala Urusan Umum Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi :

“Fasilitas, desa kan belum memiliki kantor, kantor desa sungai sirih saat ini memakai gedung bekas TK, itu yang menghambat pemerintahan desa”.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya kendala dalam Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi desa sungai sirih saat ini ialah keterbatasan fasilitas karena saat ini kantor desa masih menggunakan gedung bekas taman kanak-kanak dan sedikit sumber daya manusia yang handal yang benar-benar memahami administrasi dan menguasai IT.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kuantan Singingi mengenai indikator Efisiensi. Bahwa Efisiensi ialah yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Berikut Kutipan Wawancara Dengan Supardjo selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi:

“kami sebagai perangkat desa sudah mengupayakan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi desa Sungai Sirih ini dengan baik, agar administrasi desa diselenggarakan sebagaimana mestinya”.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya Usaha oleh pihak pelaksana dalam penyelenggaraan administrasi desa di desa Sungai Sirih sudah mengupayakan pelaksanaan semaksimal mungkin sesuai peraturan yang berlaku, agar administrasi desa diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kuantan Singingi mengenai indikator kecukupan. Kecukupan ialah Kecukupan sumber daya dengan jumlah pengguna jasa, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran.

Adapun pertanyaannya Bagaimana Kecukupan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan administrasi desa di desa sungai sirih ini. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Suminto selaku Kepala Desa dan dengan Anang Hermawan selaku Kepala Urusan Kesejahteraan & Pelayanan yang sependapat dengan kepala desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kuantan Singingi :

“Sumber daya manusia ada saya, sekretaris, kepala urusan, sudah cukuplah untuk penyelenggaraan administrasi desa di desa sungai sirih ini yang ruang lingkungnya kecil”.

Menurut pengamatan penulis bahwa peralatan dalam penyelenggaraan administrasi desa di desa sungai sirih ini sudah mencukupi, hanya saja sumber daya yang benar-benar memahami administrasinya yang kurang dalam penyelenggaraan administrasi desa di desa sungai sirih ini.

Adapun pertanyaan tentang indikator Kesamaan pemberlakuan administrasi pemerintahan desa, apakah seluruh desa memiliki administrasi desa yang sama dengan desa sungai sirih ini. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Suminto selaku Kepala Desa dan dengan Anang Hermawan selaku Kepala Urusan Kesejahteraan & Pelayanan yang sependapat dengan kepala desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kuantan Singingi :

“Pemberlakuan ya sama setiap desa, keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa itulah administrasi desa, pasti seluruh desa sama, karena memang ini bagian dari tugas pemerintahan desa yang sudah di atur peraturan pemerintah dalam negeri.”

Menurut pengamatan penulis bahwa setiap desa memang memiliki kesamaan pemberlakuan kewajiban administrasi, setiap desa wajib tertib administrasi, karena administrasi ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah dalam negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa.

Berdasarkan Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kuantan Singingi mengenai indikator Ketanggapan. Ketanggapan yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat.

Adapun pertanyaannya bagaimana ketanggapan dalam Pelaksanaan Administrasi Desa Didesa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu adakah kendala apabila sewaktu-waktu ada yang membutuhkan data mengenai administrasi? Bagaimana mengatasinya. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Suminto selaku Kepala Desa dan dengan Anang Hermawan selaku Kepala Urusan Kesejahteraan & Pelayanan yang sependapat dengan kepala desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kuantan Singingi :

“Untuk kendala saya rasa tidak ada, Kami selalu terbuka apabila sewaktu-waktu ada yang membutuhkan data mengenai administrasi desa ini, sudah lengkap meski ada beberapa yang belum uptodate di buku administrasi desa, namun selalu melengkapi dan mengupdate data mengenai informasi desa ini. Hanya saja kepada siapa saja yang membutuhkan data mengenai informasi ini terlebih dahulu harus melalui prosedur peminjaman yang telah ditetapkan yaitu dengan surat permohonan terlebih dahulu, setelah kami setuju baru data dapat dipinjamkan.”

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya kendala apabila sewaktu-waktu ada yang membutuhkan data mengenai administrasi, kendala tidak begitu signifikan, Hanya saja kepada siapa saja yang membutuhkan data mengenai informasi ini terlebih dahulu harus prosedur peminjaman yang telah ditetapkan yaitu dengan surat permohonan terlebih dahulu, setelah kami setuju baru data dapat dipinjamkan, pihak desa terbuka terhadap seluruh data informasi mengenai desa, mengenai kelengkapan data informasi desa sungai sirih sudah cukup lengkap hanya saja ada beberapa yang masih belum uptodate namun setiap tahunnya pihak pemerintah desa akan memperbaharunya.

Berdasarkan Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kuantan Singingi mengenai indikator Ketepatan. Ketepatan yaitu yaitu yang berhubungan dengan hasil, apakah hasil yang diinginkan benar tercapai. Berikut Kutipan Wawancara Dengan Endar Moyo Selaku Sekretaris Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi :

“Hasil dari pelaksanaan aministrasi desa sungai sirih ini sudah baik, karna keseluruhan pencatatan data dan informasi pemerintahan desa sungai sirih ini sudah kami laksanakan sebagaimana mestinya”.

Menurut pengamatan penulis bahwa pelaksanaan administrasi didesa sungai sirih belum sepenuhnya baik, sebab desa memiliki Sedikit sumber daya manusia yang handal yang benar-benar mengerti urusan administrasi, dan juga kurang menguasai IT, serta Keterbatasan fasilitas karena saat ini kantor desa masih menggunakan gedung bekas taman kanak-kanak yang akan membuat proses administrasi desa kurang maksimal.

6. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Administrasi Desa di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dilapangan yang menunjukkan Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ini kekurangan sumberdaya manusia yang benar – benar memahami mengenai administrasi desa ini dan sumber daya yang paham IT, serta Keterbatasan fasilitas karena saat ini kantor desa masih menggunakan gedung bekas taman kanak-kanak yang membuat Pelaksanaan pemerintahan desa belum optimal, termasuk Pelaksanaan Administrasi desa ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Penyusunan Jurnal ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, diantaranya: 1. Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi. 2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. 3. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi dan Selaku dosen pembimbing 1 yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang

sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Skripsi ini. 4. Bapak Alshar Andri, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Skripsi ini. 5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai. Diharapkan jurnal ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Selain itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca sekalian agar penulis bisa lebih baik lagi dalam menulis karya ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. CV Pustaka Setia : Bandung.
- Anwar Prabu Mangkunegara 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta : Bandung.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Bumi Aksara : Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Handoko, T. Hani, 2008. *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia*, Edisi. Kedua, BPFE-Yogyakarta.
- Handoko, T. Hani. 2014. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE-Yogyakarta
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016. *Dasar – dasar dan Teori Administrasi Publik*. Intrans Publishing, Malang.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mulyadi. 2015. *auditting*, Buku 1 edisi 6. Salemba Empat : Jakarta.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. PMN : Surabaya.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan Jakarta.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama : Bandung.
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – asas manajemen*. PT. Refika Aditama : Bandung.
- Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 2016. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Terry, George. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. PT Bumi Aksara : Jakarta.
- Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik. Kontemporer*, Kencana. Jakarta
- Husein, umar. 2002. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Husein, Umar, 2005. *Metode Penelitian*. Salemba Empat : Jakarta.